

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi dewasa turut mempercepat laju perkembangan ekonomi dan industri, begitu pula berdampak penting terhadap dunia pendidikan. Salah satu dampak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang paling nyata dirasakan yaitu menyangkut lapangan kerja, baik dilihat dari kebutuhan masyarakat maupun kemampuan dalam menyiapkan tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan masalah penyiapan tenaga kerja, yang dihadapi di lapangan yaitu rendahnya mutu tenaga kerja.

Dalam membangun pendidikan, komisi nasional pendidikan menyebutkan bahwa Indonesia bertekad memperkokoh potensi pendidikan nasional untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang menandai kehidupan milenium ketiga. Sejak negara ini berdiri, telah banyak upaya yang dilakukan

untuk mencapai mutu pendidikan yang terbaik, kendati belum sebaik dan sebanyak yang diinginkan.¹

Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk membangun suatu bangsa. Sering kali kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauh mana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauh mana output (lulusan) suatu pendidikan dapat membangun sebagai manusia yang paripurna sebagaimana tahapan pendidikan tersebut.²

Al-quran juga telah memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

۱۲۲

¹ Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf, *Mutu Pendidikan*. (Cet 1; Jakarta; Bumi Aksara, 2010), hal. 2

² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*. (Cet.1V; Bandung; Alfabeta, 2009), hal. 287

Artinya: *“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.*³

Betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan buruk, benar dan salah, yang membawa manfaat dan membawa madharat.

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Secara detail, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal (1), pendidikan didefinisikan sebagai:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

³ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), hal. 187

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan, juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batasan-batasan tertentu, tapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang yang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (school based quality management) atau dalam nuansa yang lebih yang lebih bersifat pembangunan (developmental).⁴

Oleh karena itu, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin pendidikan adalah mutu lembaga pendidikan karena seluruh manajemen komponen pendidikan

⁴ Aminatu Zohrah, *Total Quality Manajemen, Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta; Ar-ruzz Media, 2014), hal 17-19

senantiasa berorientasi pada pencapaian mutu. Semua program dan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan pada hakikatnya diarahkan pada pencapaian mutu. Dengan demikian, nantinya tercipta sekolah yang bermutu atau sekolah efektif. Menciptakan sekolah yang efektif dan bermutu tidak semudah membalik telapak tangan. Sekolah yang efektif dan bermutu harus dimulai dengan kerja keras dan semua komponen sekolah mau dan mampu untuk proaktif dan menjemput bola dengan program dan kegiatan perencanaan, proses, dan evaluasi dengan sungguh-sungguh.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “gerakan peningkatan mutu pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002, dan lebih terfokus lagi setelah diamanatkan dalam UUD NO. 20 Tahun 2003 bab III pasal 3, tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab.”⁵

Suatu pendidikan atau sekolah sebagai pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi siswa yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya, harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Hal ini dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan siswa.

Menurut *Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, hal 8-9

bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Adapun yang dimaksud Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan umumnya terbagi dua, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE). Menurut *Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan dasar dan satuan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPME) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan menengah.

Fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ditegaskan dalam pasal 2 *Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, yang menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sedangkan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematis, holistik dan berkelanjutan. Sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Para pakar berbeda pandangan mengenai konsepsi mutu. Namun, pada dekade ini terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yaitu, W. Edwards Deming, Philip B. Crosby dan Joseph M. Juran. W. Edward Deming mendefinisikan mutu adalah semua kebutuhan dan keinginan pelanggan, Philip B. Crosby mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Meskipun ketiga pakar tersebut berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas pendidikan saat ini.

Manajemen mutu adalah suatu upaya manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan. Tujuan manajemen mutu adalah menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan yang akan memberikan kepuasan stakeholder dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan secara terus-menerus. Upaya peningkatan mutu

pendidikan yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minta dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ras, etnis, agama dan gender.⁶

Salah satu kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan khusus (*Life Skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk menegnal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai agama dan ideologi Negara.

⁶ Suryadi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Sarana Panca Karya Nusa, 2009), hal. 2

Pada hakikatnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan, ini disebabkan anatar lain: masalah manajemen pendidikan yang kurang tepat, penempatan tenaga tidak sesuai dengan bidang keahliannya, penanganan masalah bukan pada ahlinya, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan secara signifikan.

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada dilingkungan pendidikan tersebut terletak pada manajemen mutu yang akan memberikan solusi para profesional pendidikan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Karena manajemen mutu dapat digunakan untuk membangun aliansi antara pendidikan, bisnis dan pemerintah. Manajemen mutu dapat membentuk masyarakat responsive terhadap perubahan tuntutan masyarakat di era globalisasi ini. Manajemen mutu juga dapat membentuk sekolah yang tanggap

dan mampu merespon perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan dan memberikan kepuasan kepada *stakeholder*.

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, dapat ditegaskan bahwa mutu pendidikan saat ini sedang menghadapi problem pelik dan kompleks, bukan saja problem-problem rutin administrasi, namun pula hadirnya kemampuan keterampilan menejerial pimpinan lembaga pendidikan, perubahan perilaku dan pola hidup pimpinan lembaga pendidikan khususnya di lembaga pendidikan islam, rendahnya partisipasi dan tanggung jawab secara komprehensif tenaga pendidik dan kependidikan, niat yang kurang tulus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang diemban oleh tim work tenaga pendidik dan kependidikan, para pelanggan penggunalulusan menuntut profesionalisme terhadap teori, skill dan pengalaman yang mereka miliki sesuai dengan tuntutan lapangan, masih carut marutnya pemahaman dan aplikasi teori belajar dan pembelajaran yang dimiliki oleh guru dan evaluasi pembelajaran yang masih labil dan berubah-ubah akan mempengaruhi kegoncangan pemahaman dan ketidaknyamanan pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk menyahtui perkembangan social politik, ekonomi, social dan budaya global yang telah mempengaruhi hidup dan kehidupan saat ini dan masa depan, pendidikan diharuskan bersikap responsive dan pro aktif terhadap tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan persekolahan. Tuntutan tersebut adalah agar dunia pendidikan persekolahan dapat memberikan layanan prima terhadap pelanggan atau pengguna jasa pendidikan tersebut, sehingga secara normative dapat merubah sikap dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik.⁷

Hal diatas mengidentifikasikan bahwa sebuah lembaga pendidikan harus dikelola secara professional, sehingga dapat menghasilkan output yang potensial dan kompotitif. Sekolah sebagai sarana untuk mencetuskan sumber daya dan menjadikan sumber daya produktif perlu untuk memposisi kembali menjadi sekolah yang handal, berkualitas dan berstandar nasional maupun internasional yang dikembangkan bersama oleh warga seklah dengan menggalakkan peran sera pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat sebagai *stakeholder*.

⁷ Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hal.

Menyadari akan hal tersebut, banyak lembaga pendidikan kemudian berupaya menerapkan konsep manajemen modern untuk mempercepat ketertinggalan serta meraih sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Penerapan ini merupakan ikhtisar agar sekolah dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya melalui perbaikan yang berkeseluruhan, kualitas, produk, jasa, manusia, proses serta lingkungan organisasi.⁸

Agar mutu tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol harus ada standar yang mengatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). Pemikiran seperti ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan yang mampu memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki sekolah yang efektif sehingga tujuan sekolah dapat tercapai.⁹

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis hendak membahas tentang “Penerapan Sistem Manajemen

⁸ Fandi Tjiptono, Anastasia Diana, *Total Quality Manajemen*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1994), hal. 4

⁹ Aminatul Zohrah, (*Total Quality Manajemen, Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkak Mutu Pendidikan*), hal 20-21

Mutu dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA AL-WASATIYAH KOTA TANGERANG”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di SMA Al-Wasatiyah Cipondoh Kota Tangerang sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya penerapan sistem manajemen mutu
2. Belum efektifnya para tenaga pendidik dalam menciptakan sistem manajemen mutu
3. Kurang meningkatnya pencapaian mutu pendidikan

C. Fokus Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah penulis adalah menerapkan sistem manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA AL-WASATIYAH KOTA TANGERANG.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah Penerapan Sistem Manajemen Mutu Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA AL-

WASATIYAH KOTA TANGERANG. Supaya lebih jelas lagi, akan dirumuskan bagian pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penerapan sistem manajemen mutu di SMA Al-Wasatiyah?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan di SMA Al-Wsatiyah?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu di SMA Al-Wasatiyah?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat prosesnya sistem manajemen mutu pendidikan di SMA Al-Wasatiyah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perencanaan manajemen mutu
2. Mengetahui pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan
3. Menganalisis evaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan

4. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat sistem manajemen mutu pendidikan

F. Manfaat Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan di atas, yaitu kiranya dapat diambil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan sebagai bahan bacaan dan data terhadap pengetahuan tentang sistem manajemen mutu pendidikan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan hasil pertimbangan dalam peningkatan penerapan sistem manajemen mutu.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal positif bagi sekolah dalam meningkatkan sistem manajemen mutu dan komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya kajian bidang manajemen mutu dalam bidang manajemen pendidikan islam.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab-nya terdiri dari beberapa sub-sub atau pembahasan, dengan perinci sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Kajian Pustaka yang meliputi: Landasan Teori, hasil-hasil penelitian yang relevan dan kerangka pikir penelitian.

Bab ketiga, Metodologi Penelitian yang meliputi: Tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, sumber dan data jenis data, teknik analisis data.

Bab keempat, Penelitian dan Pembahasan yang meliputi: Tinjauan umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima, Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan saran.